MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 25 No 8 Tahun 2026

EFEKTIVITAS INFORMASI LAPORAN KEUANGAN DALAM PENGELOLAAN KAS PADA DINAS SOSIAL DAERAH PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Jigisa Kogoya [1], Jenny Morasa [2], Diana Lintong [3]
Universitas Sam Ratulangi

Email: jigisakogoya21@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas informasi laporan keuangan dalam mendukung pengelolaan kas pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Utara. Sebagai instansi pemerintah, Dinas Sosial menyusun laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagai dasar perencanaan, pengambilan keputusan, dan pengawasan pengelolaan kas. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis difokuskan pada efektivitas informasi laporan keuangan (relevansi, keandalan, keterpahaman, ketepatan waktu, dan kelengkapan) serta pengelolaan kas (perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa informasi laporan keuangan telah cukup efektif, terutama dari aspek relevansi dan keterpahaman. Namun, ketepatan waktu penyampaian laporan, kelengkapan dokumen, dan pemanfaatan sistem informasi masih perlu ditingkatkan. Laporan keuangan juga telah membantu perencanaan dan pengendalian kas, meskipun pengawasan dan evaluasi masih perlu diperkuat. Kesimpulannya, efektivitas informasi laporan keuangan berperan penting dalam mendukung pengelolaan kas yang lebih akuntabel dan efisien. Oleh karena itu, peningkatan ketepatan waktu, kelengkapan data, dan pemanfaatan teknologi informasi perlu terus dilakukan.

Kata Kunci: Efektivitas Informasi, Laporan Keuangan, Pengelolaan Kas, SAK, Dinas Sosial.

Article history
Received: Juli 2026
Reviewed: Juli 2026
Published: Juli 2026

Plagirism checker no 80
Copyright : author
Publish by : musytari

This work is licensed under a creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license

PENDAHULUAN

Pengelolaan kas merupakan bagian penting dalam sistem akuntansi sektor publik karena berperan dalam mendukung perencanaan, pengendalian, serta pengambilan keputusan keuangan. Laporan keuangan menjadi sumber informasi utama untuk menilai kondisi dan kinerja keuangan suatu instansi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), pemerintah pusat maupun daerah wajib menyusun laporan keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Penyusunan laporan keuangan yang berkualitas diharapkan mampu mendukung pengelolaan kas yang transparan, akuntabel, dan efisien.

Sebagai perangkat daerah yang mengelola dana publik melalui APBD, Dinas Sosial Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menghadapi berbagai tantangan dalam penyusunan laporan keuangan. Kendala seperti keterlambatan penyampaian laporan, ketidaktepatan pencatatan transaksi, tingginya volume transaksi bantuan sosial, serta belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi keuangan dapat memengaruhi kualitas informasi laporan keuangan. Akibatnya,

pengelolaan kas menjadi kurang efektif dan berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian antara realisasi pengeluaran dengan anggaran yang telah ditetapkan.

Efektivitas informasi laporan keuangan sangat ditentukan oleh kualitas informasi yang disajikan, seperti relevansi, keandalan, ketepatan waktu, kelengkapan, dan kemudahan dipahami. Informasi yang berkualitas akan membantu pimpinan dalam merencanakan, mengendalikan, dan mengevaluasi penggunaan kas secara tepat sehingga meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Menurut Robbins dan Coulter (2021), efektivitas merupakan kemampuan organisasi mencapai tujuan secara optimal melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki. Dalam konteks pemerintah daerah, efektivitas informasi laporan keuangan menjadi faktor penting untuk mendukung pengelolaan kas yang efisien, transparan, dan akuntabel. Namun, masih terdapat keterbatasan pemahaman teknis pegawai terhadap laporan keuangan serta kurangnya pemanfaatan informasi tersebut sebagai dasar pengambilan keputusan.

Berdasarkan kondisi tersebut, perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui sejauh mana efektivitas informasi laporan keuangan dalam mendukung pengelolaan kas pada Dinas Sosial Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan bagi peningkatan kualitas pelaporan keuangan, pengelolaan kas, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, penelitian ini berjudul **"Efektivitas Informasi Laporan Keuangan dalam Pengelolaan Kas pada Dinas Sosial Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi Keuangan

Akuntansi keuangan merupakan salah satu cabang akuntansi yang berfokus pada proses pencatatan, atau melacak, mengklasifikasikan, meringkas, dan melaporkan aktivitas keuangan suatu entitas, akuntan keuangan berharap dapat menawarkan data keuangan yang andal dan dapat ditindaklanjuti kepada para pemangku kepentingan. Keputusan, baik internal maupun eksternal, didasarkan pada data yang disediakan oleh akuntansi keuangan. Aktivitas dan status keuangan suatu perusahaan dapat dilaporkan kepada para pemangku kepentingan melalui akuntansi, yang didefinisikan sebagai sistem informasi (Warren, C.S., Reeve, J.M., & Duchac, J.E., 2020). Laporan-laporan ini meringkas situasi keuangan, kinerja, dan perubahan kondisi keuangan suatu entitas dengan mencerminkan hasil dari prosedur akuntansi yang sistematis.

Memberikan angka-angka yang dibutuhkan orang untuk membuat keputusan keuangan yang cerdas adalah tujuan utama akuntansi. Bagi pihak internal, seperti manajemen organisasi, informasi akuntansi membantu dalam perencanaan, pengendalian, serta evaluasi kinerja. Sedangkan bagi pihak eksternal, seperti pemerintah, kreditur, investor, maupun masyarakat, laporan keuangan berfungsi sebagai dasar untuk menilai kinerja, akuntabilitas, serta kelangsungan suatu entitas.

Laporan Keuangan

Akuntansi menghasilkan laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai aset, kewajiban, pendapatan, belanja, serta arus kas suatu entitas dalam periode tertentu. Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), tujuan utama laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang relevan, andal, dan akuntabel sebagai dasar pengambilan keputusan. Selain itu, laporan keuangan berfungsi untuk menjelaskan sumber dan penggunaan dana, menilai kepatuhan terhadap anggaran, mengevaluasi kinerja entitas, serta mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan pemerintah terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA),

Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Informasi Laporan Keuangan

Informasi dalam laporan keuangan merupakan bagian penting dari sistem akuntansi karena memberikan gambaran mengenai kondisi keuangan, kinerja, dan arus kas suatu entitas. Laporan keuangan yang disusun sesuai standar akuntansi menjadi dasar bagi para pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan ekonomi (Horngren, C.T., Sundem, G.L., & Elliott, J.A., 2020).

Dalam pengelolaan kas, informasi laporan keuangan yang akurat, relevan, dan tepat waktu mendukung perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi kebijakan keuangan. Pengelolaan keuangan daerah yang baik harus dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan peraturan yang berlaku (Halim, A., 2020).

Pengelolaan Keuangan

Pengelolaan sumber daya keuangan mencakup persiapan, pelaksanaan, pengawasan, dan akuntansi yang sistematis dan sah atas sumber daya tersebut. Semua hak dan tanggung jawab yang memiliki nilai moneter, serta setiap properti atau aset yang dimiliki oleh negara atau wilayah, termasuk dalam pengelolaan keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2010 tentang Keuangan Negara.

Dalam hal pemerintahan kota/kabupaten, pengelolaan keuangan yang baik adalah tentang menjaga dana kas negara tetap terbuka, akuntabel, terpakai dengan baik, dan sesuai anggaran yang ditetapkan. Pengelolaan keuangan didasarkan pada prinsip-prinsip berikut: keterbukaan, tanggung jawab, efektivitas, efisiensi, dan kepatuhan terhadap peraturan.

Perbedaan antara akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan adalah penekanan transparansi pada kebutuhan akuntabilitas agar semua pengeluaran dana publik dapat dilacak. Dalam hal memaksimalkan sumber daya keuangan, efisiensi dan efektivitas adalah kuncinya.

Pengelolaan keuangan juga harus mematuhi semua peraturan yang relevan, seperti Peraturan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) No. 71 Tahun 2010 dan Peraturan Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah No. 77 Tahun 2020, yang keduanya dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri. Karena kas merupakan aset yang paling likuid dan digunakan untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari, pengelolaan keuangan sangat terkait dengan pengelolaan kas.

Pengelolaan Kas

Pengelolaan kas merupakan bagian penting dari manajemen keuangan karena kas adalah aset yang paling likuid dan berperan dalam mendukung kelancaran operasional organisasi. Di sektor publik, pengelolaan kas bertujuan memastikan penerimaan dan pengeluaran dana dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sehingga penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Mahmudi (2020), pengelolaan kas meliputi perencanaan, pengendalian, dan pemantauan terhadap arus kas masuk dan keluar agar tersedia dana yang cukup untuk mendukung kegiatan organisasi. Pengelolaan kas yang baik juga membantu mencegah kekurangan kas (*cash shortage*) maupun kelebihan kas (*idle cash*) yang dapat mengurangi efektivitas penggunaan anggaran. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan kas yang baik, sistem informasi akuntansi yang andal, serta laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu untuk mendukung pengelolaan kas yang optimal.

Efektivitas Informasi Laporan Keuangan

Efektivitas laporan pengelolaan kas menunjukkan sejauh mana laporan keuangan dapat mendukung perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian arus kas. Laporan yang efektif tidak hanya menyajikan data keuangan, tetapi juga memberikan informasi yang menjadi dasar pengambilan keputusan yang tepat. Menurut Mahmudi (2020), pengelolaan kas yang efektif harus didukung oleh sistem pelaporan yang mampu menggambarkan kondisi kas secara akurat sehingga manajemen dapat mengantisipasi kekurangan maupun kelebihan kas.

Efektivitas laporan pengelolaan kas diukur melalui ketepatan waktu, keakuratan, keterpahaman, dan relevansi informasi yang disajikan. Karakteristik tersebut memastikan laporan dapat dipercaya, mudah dipahami, serta bermanfaat bagi manajemen, auditor, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk menganalisis efektivitas informasi laporan keuangan dalam pengelolaan kas pada Dinas Sosial Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Menurut Sugiyono (2022), penelitian kualitatif bertujuan memahami fenomena secara mendalam dalam kondisi yang alami, dengan peneliti sebagai instrumen utama. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara induktif untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif.

Sejalan dengan itu, Moleong (2020) menyatakan bahwa penelitian kualitatif bertujuan memahami pengalaman dan fenomena yang terjadi dalam lingkungan alami. Melalui pendekatan ini, penelitian berfokus pada efektivitas informasi laporan keuangan dari aspek ketepatan waktu, keandalan, relevansi, serta pemanfaatannya dalam mendukung pengambilan keputusan dan pengelolaan kas di instansi.

Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi Penelitian ini dilaksanakan pada (Dinas Sosial Daerah) Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Alamat: Jalan Pingkan Matindas Nomor 125, Kelurahan Ranotana,Kecamatan Paal Dua, Kelurahan Dendengan Dalam,Kota Manado,Pro vinsi Sulawesi Utara.

Penelitian ini direncanakan berlangsung selama tiga bulan, mulai dari bulan Oktober 2025 hingga Desember 2025.Tahapan kegiatan penelitian meliputi:

1. Tahap persiapan dan pengurusan izin penelitian: Minggu pertama hingga minggu kedua bulan Oktober 2025.
2. Tahap pengumpulan data (observasi, wawancara, dan dokumentasi): Bulan November 2025.
3. Tahap analisis data dan penyusunan laporan hasil penelitian: Bulan Desember 2025.

Dengan pelaksanaan penelitian pada waktu dan tempat tersebut, diharapkan diperoleh hasil yang akurat dan mendalam mengenai efektivitas informasi laporan keuangan dalam pengelolaan kas pada Dinas Sosial Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

Jenis Data

Berdasarkan jenisnya, data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang tidak berbentuk angka tetapi berupa narasi, pernyataan, dokumen, atau hasil observasi yang berkaitan dengan efektivitas informasi laporan keuangan dan pengelolaan kas. Data kualitatif ini digunakan untuk menggali pemahaman mendalam

mengenai bagaimana laporan keuangan digunakan dalam pengambilan keputusan pengelolaan kas.

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini ada dua, yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari narasumber melalui wawancara dengan instrument quisioner kepada pegawai/staf keuangan, bendahara, atau pejabat terkait pada Dinas Sosial Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari dokumen atau arsip yang tersedia, seperti:

a. Laporan keuangan bulanan/tahunan,
b. Dokumen perencanaan kas,
c. Standar Operasional Prosedur (SOP),
d. Peraturan dan pedoman pengelolaan keuangan daerah.

Metode dan Proses Analisis Data

Analisis data kualitatif deskriptif merupakan pendekatan analisis data yang dipilih untuk penelitian ini. Tujuan dari metode ini adalah untuk menganalisis dan mengkarakterisasi efektivitas manajemen kas berdasarkan data laporan keuangan.

Proses analisis data dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data melalui wawancara dengan pegawai atau pengelola keuangan, observasi langsung di lokasi, serta dokumentasi terhadap laporan keuangan.
2. Reduksi Data, Setelah data terkumpul, peneliti mereduksi data dengan cara memenuih informasi yang relevan dengan fokus penelitian, seperti ketepatan waktu laporan, kejelasan isi laporan, dan hubungan antara laporan keuangan dengan pengambilan keputusan pengeluaran kas.
3. Penyajian Data, Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif, tabel temuan lapangan, atau matriks tema, agar dapat dianalisis lebih lanjut dan mempermudah dalam memahami pola yang muncul.
4. Penarikan Kesimpulan, Peneliti menyimpulkan temuan berdasarkan pola dan keterkaitan antara informasi laporan keuangan dengan efektivitas dalam pengelolaan kas. Kesimpulan yang ditarik ini diverifikasi kembali dengan data untuk memastikan dan menghindari tidak relevan agar penelitian dapat memberikan gambaran yang jelas.

HASIL PENELITIAN

Laporan Keuangan Realisasi Anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LRA

Hasil penelitian ini mengkaji efektivitas informasi laporan keuangan dalam pengelolaan kas pada Dinas Sosial Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Data yang digunakan merupakan data primer berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun Anggaran 2023, serta data pembanding berupa realisasi Tahun Anggaran 2022.

Analisis dilakukan dengan pendekatan akuntansi keuangan sektor publik yang mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK), khususnya prinsip pengakuan, pengukuran, dan penyajian informasi keuangan berbasis akrual. Penyajian hasil penelitian difokuskan pada angka anggaran, realisasi, serta perbandingan antar periode tanpa melakukan interpretasi teoritis yang berlebihan.

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 25 No 8 Tahun 2026

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Tidak ada alokasi dana untuk Pendapatan Daerah Asli (PAD) Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Utara pada Tahun Anggaran 2023. Meskipun demikian, tercatat realisasi sebesar Rp14.620.700,00. Menurut basis pengakuan pendapatan kas-ke- akrual SAK, realisasi ini berasal dari pendapatan pungutan daerah, yang dicatat sebagai pendapatan pada saat penerimaan kas di Rekening Kas Umum Daerah. Pendapatan untuk Tahun Anggaran 2023 lebih rendah dari Rp36.875.854,00 yang diperoleh untuk PAD pada Tahun Anggaran 2022.

Tabel 1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Utara

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
PAD	0,00	14.620.700,00	36.875.854,00

Secara akuntansi keuangan, kondisi ini menunjukkan bahwa PAD bukan merupakan sumber pendanaan utama bagi Dinas Sosial, sehingga pengelolaan kas sangat bergantung pada transfer pemerintah daerah.

Belanja Daerah

Pengeluaran daerah untuk Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Utara pada tahun anggaran 2023 adalah Rp19.745.731.621,00, atau 87,96% dari pengeluaran aktual, turun dari Rp33.467.494.677,00 pada tahun anggaran 2022. Anggaran untuk tahun anggaran 2023 adalah Rp22.442.995.706,00.

Tabel 2 Belanja Daerah Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Utara

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
Belanja Daerah	22.442.995.706,00	19.745.731.621,00	87,96	33.467.494.677,00

Sumber: Data Olahan Penulis (2026)

Belanja daerah terdiri atas belanja operasi dan belanja modal, yang masing-masing memberikan kontribusi berbeda terhadap arus kas keluar.

Analisis Belanja Operasi

Sebesar Rp19.436.192.521,00, atau 87,81% dari pengeluaran operasional yang direncanakan untuk tahun fiskal 2023, telah benar-benar terealisasi. Anggaran awal adalah Rp22.133.357.414,00. Semua pengeluaran yang terkait dengan barang dan jasa, karyawan, dan dukungan sosial termasuk dalam biaya operasional.

Tabel 3 Realisasi Belanja Operasi

Jenis Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
Belanja Operasi	22.133.357.414,00	19.436.192.521,00	87,81	33.247.845.202,00

Sumber: Data Olahan Penulis (2026)

a. Belanja Pegawai

Belanja pegawai direalisasikan sebesar Rp9.749.920.029,00 atau 81,70% dari anggaran. Penurunan realisasi dibandingkan Tahun Anggaran 2022 menunjukkan adanya pengendalian belanja pegawai yang lebih efektif.

Tabel 4 Rincian Belanja Pegawai

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
Gaji dan Tunjangan	7.929.684.500	5.990.525.276	75,55	6.265.326.894
Tambahan Penghasilan PNS	4.004.369.200	3.759.394.753	93,88	4.275.800.476
Jumlah	11.934.053.700	9.749.920.029	81,70	10.541.127.370

Sumber: Data Olahan Penulis (2026)

Dalam perspektif akuntansi keuangan, belanja pegawai merupakan komponen belanja operasi yang berdampak langsung terhadap arus kas keluar dan memerlukan pengendalian yang ketat agar tidak membebani keuangan daerah.

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa direalisasikan sebesar Rp8.778.374.092,00 atau 94,48%. Tingginya tingkat realisasi menunjukkan bahwa kegiatan operasional dinas berjalan sesuai perencanaan dan kebutuhan pelayanan publik.

Tabel 5 Rincian Belanja Barang dan Jasa

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
Barang habis pakai	6.648.294.502	6.417.425.081	96,53	18.220.037.779
Jasa Kantor	1.021.254.202	896.845.135	87,82	1.127.770.485
Iuran Jamiinan/ Asuransi	38.369.402	34.654.316	90,32	41.788.757
Sewa dan Pemeliharaan	625.470.600	564.986.720	90,34	452.117.718
Perjalanan Dinas	957.382.926	864.462.840	90,29	779.867.393
Jumlah	9.290.771.632	8.778.374.092	94,48	20.621.582.132

Sumber: Data Olahan Penulis (2026)

c. Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial direalisasikan sebesar Rp907.898.400,00 atau 99,93%, mencerminkan efektivitas penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat.

Tabel 6 Rincian Belanja Bantuan Sosial

Jenis Bantuan Sosial	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%
Bantuan Barang kepada Individu	85.250.000	85.250.000	100
Bantuan Barang kepada Kelompok Masyarakat	209.700.000	209.648.400	99,97
Bantuan Uang kepada Lembaga	613.582.082	613.000.000	99,90
Jumlah	908.532.082	907.898.400	99,93

Sumber: Data Olahan Penulis (2026)

Analisis Belanja Modal

Jumlah aktual yang dikeluarkan untuk belanja modal pada tahun fiskal 2023 adalah Rp309.539.100,00, yang setara dengan 99,97% dari jumlah yang diproyeksikan. Untuk mendukung operasional layanan jangka panjang, aset tetap dibeli dengan belanja modal.

Tabel 7 Realisasi Belanja Modal

Jenis Belanja Modal	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%
Peralatan dan Mesin	309.638.292,00	309.539.100,00	99,97

Sumber: Data Olahan Penulis (2026)

Tingginya tingkat realisasi belanja modal mencerminkan ketepatan perencanaan pengeluaran kas serta kepatuhan terhadap prinsip akuntansi berbasis akrual sesuai Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

1. Aset Lancar

Aset lancar merupakan aset yang dapat direalisasikan atau digunakan dalam jangka waktu kurang dari satu tahun. Berdasarkan Laporan Keuangan Dinas Sosial Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, total aset lancar per 31 Desember 2023 sebesar Rp326.797.200 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp375.433.939

Pada tahun 2023 tidak terdapat saldo kas dan setara kas. Selain itu, piutang lainnya mengalami penurunan sebesar 100% dari Rp152.099.939 pada tahun 2022 menjadi Rp0,00 pada tahun 2023. Sementara itu, persediaan meningkat dari Rp223.334.000 menjadi Rp326.797.200, atau bertambah sebesar Rp103.463.200 (46,33%) yang menunjukkan adanya penambahan barang persediaan untuk mendukung kegiatan operasional dinas.

Berdasarkan rincian mutasi persediaan tahun 2023, saldo awal persediaan sebesar Rp223.334.000 dengan penambahan persediaan sebesar Rp310.147.200dan pengurangan sebesar Rp206.684.000, sehingga saldo akhir persediaan menjadi Rp326.797.200.

2. Aset Tetap

Aset tetap dicatat berdasarkan biaya perolehan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Total nilai aset tetap Dinas Sosial Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara

per 31 Desember 2023 sebesar Rp25.586.627.173 Nilai aset tanah tetap sebesar Rp19.634.159.000, sama dengan tahun sebelumnya karena tidak terdapat penambahan aset tanah selama tahun anggaran 2023.

Peralatan dan mesin mengalami peningkatan dari Rp4.339.434.075 pada tahun 2022 menjadi Rp4.609.198.175 pada tahun 2023. Kenaikan tersebut berasal dari belanja modal peralatan dan mesin selama tahun 2023. Nilai gedung dan bangunan tetap sebesar Rp7.018.610.722, sedangkan aset jalan, irigasi, dan jaringan juga tidak mengalami perubahan dengan nilai Rp276.168.500.

Aset tetap lainnya meningkat dari Rp180.500.000 menjadi Rp206.025.000 atau bertambah sebesar **Rp25.525.000 yang berasal dari belanja modal aset rumah tangga lainnya. Akumulasi penyusutan meningkat dari Rp5.669.700.787 menjadi Rp6.157.534.223,47. Penyusutan dihitung menggunakan metode garis lurus sehingga nilai aset tetap berkurang secara sistematis sesuai dengan masa manfaatnya.

3. Dana Cadangan

Berdasarkan laporan keuangan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara tidak memiliki dana cadangan pada 31 Desember 2023 maupun 31 Desember 2022. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat alokasi dana yang disisihkan sebagai dana cadangan pada periode tersebut.

4. Aset Lainnya

Aset lainnya terdiri atas tagihan jangka panjang, aset tidak berwujud, aset lain-lain, dan akumulasi amortisasi. Pada tahun 2023, tagihan jangka panjang tetap sebesar Rp15.582.500,00, sedangkan aset tidak berwujud juga tidak mengalami perubahan dengan nilai Rp69.205.000. Nilai aset lain-lain tetap sebesar Rp663.148.159.

Sementara itu, akumulasi amortisasi aset tidak berwujud meningkat dari Rp23.880.000 pada tahun 2022 menjadi Rp39.420.000 pada tahun 2023. Peningkatan ini menunjukkan bertambahnya beban amortisasi atas aset tidak berwujud sesuai dengan umur manfaat aset tersebut.

Kewajiban

1. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek Dinas Sosial Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2023 terdiri atas utang belanja sebesar Rp365.594.385 meningkat dibandingkan tahun 2022 yang sebesar Rp340.291.278. Utang belanja merupakan kewajiban yang timbul akibat adanya transaksi atau pengadaan barang dan jasa yang telah dilaksanakan, namun pembayarannya belum dilakukan hingga akhir periode pelaporan. Dengan demikian, total kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2023 sebesar Rp365.594.385.

2. Kewajiban Jangka Panjang

Berdasarkan Laporan Keuangan Dinas Sosial Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, tidak terdapat kewajiban jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2023 maupun 31 Desember 2022. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh kewajiban yang dimiliki instansi bersifat jangka pendek.

3. Ekuitas

Ekuitas Dinas Sosial Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2023 tercatat sebesar Rp26.256.345.647 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022 yang sebesar Rp26.538.369.830. Penurunan tersebut mencerminkan adanya perubahan nilai aset bersih yang dimiliki instansi selama tahun anggaran 2023.

4. Jumlah Kewajiban dan Ekuitas

Jumlah kewajiban dan ekuitas Dinas Sosial Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2023 sebesar Rp26.621.940.032 sedangkan pada tahun 2022 sebesar Rp26.878.661.108. Laporan posisi keuangan ini memberikan gambaran mengenai kondisi keuangan instansi pada

akhir periode pelaporan, yang mencakup kewajiban yang harus dipenuhi serta nilai ekuitas yang dimiliki sebagai dasar dalam menilai kondisi keuangan organisasi.

PEMBAHASAN

Sesuai Dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Utara telah disusun sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) berdasarkan hasil penelitian.

Pendapatan, pengeluaran, aset, kewajiban, dan ekuitas dicatat secara metodis dan konsisten. Kredibilitas data laporan keuangan dan penerapannya pada manajemen kas dan akuntabilitas keuangan daerah ditingkatkan dengan kesesuaian dengan SAK ini.

Relevansi Informasi Laporan Keuangan

Informasi laporan keuangan yang disajikan oleh Dinas Sosial memiliki tingkatrelevansi yang tinggi dalam mendukung pengelolaan kas. LRA memberikan informasi mengenai perbandingan antara anggaran dan realisasi, sehingga memudahkan manajemen dalam menilai kinerja keuangan dan mengidentifikasi deviasi yang terjadi. Selain itu, Neraca dan CaLK memberikan informasi tambahan mengenai posisi aset, kewajiban, dan ekuitas yang sangat berguna dalam menilai kondisi keuangan secara menyeluruh. Dengan demikian, keputusan mengenai strategi, pelaksanaan, dan pengendalian kas dapat didasarkan pada informasi yang diberikan oleh laporan keuangan.

Efektivitas Pengelolaan Kas

Efektivitas pengelolaan kas pada Dinas Sosial dapat dilihat dari tingkat realisasi anggaran yang relatif tinggi dan mendekati target yang telah ditetapkan. Realisasi belanja daerah sebesar 87,96%, belanja operasi sebesar 87,81%, belanja bantuan sosial sebesar 99,93%, serta belanja modal sebesar 99,97% menunjukkan bahwa pengelolaan kas telah berjalan secara efektif, dalam realisas tersebut mencerminkan bahwa informasi laporan keuangan telah dimanfaatkan secara optimal dalam mengendalikan arus kas, mendukung kelancaran operasional, serta memastikan pencapaian tujuan program dan pelayanan sosial kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis data keuangan Tahun Anggaran 2023, temuan utama penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Efektivitas belanja daerah mencapai 87,96%, menunjukkan pelaksanaan anggaran berjalan cukup efektif.
2. Efektivitas belanja operasi mencapai 87,81%, mencerminkan pengelolaan kas operasional yang terkendali.
3. Efektivitas belanja bantuan sosial mencapai 99,93%, menunjukkan penyaluran dana yang sangat optimal.
4. Efektivitas belanja modal mencapai 99,97%, mencerminkan ketepatan perencanaan dan pelaksanaan pengeluaran kas.

Secara keseluruhan, rata-rata tingkat efektivitas pengelolaan kas berada pada kategori efektif hingga sangat efektif.

Implikasi bagi Instansi

Hasil penelitian ini memberikan implikasi bahwa Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Utara telah memanfaatkan informasi laporan keuangan secara efektif dalam pengelolaan kas. Tingginya tingkat realisasi anggaran menunjukkan bahwa laporan keuangan berperan penting sebagai alat

perencanaan, pengendalian, dan evaluasi keuangan. Implikasi lainnya adalah perlunya mempertahankan kualitas penyajian laporan keuangan sesuai SAK serta meningkatkan pemanfaatan informasi laporan keuangan dalam perencanaan anggaran pada periode mendatang.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai efektivitas informasi laporan keuangan dalam pengelolaan kas pada Dinas Sosial Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, dapat disimpulkan bahwa informasi keuangan yang disusun dan disajikan oleh bidang keuangan telah membantu proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan kas. Informasi laporan keuangan yang mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) telah memenuhi karakteristik informasi yang relevan, andal, dapat diperbandingkan antar periode anggaran, dan disampaikan tepat waktu, sehingga mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran.

Informasi laporan keuangan digunakan sebagai dasar dalam pengendalian kas, pengawasan serapan anggaran, serta evaluasi antara rencana dan realisasi program kesejahteraan sosial. Dengan demikian, efektivitas informasi yang dihasilkan dinas memengaruhi bagaimana kebijakan pengeluaran, prioritas pembiayaan, dan keputusan pelaksanaan program dilaksanakan secara terukur dan sesuai kebutuhan lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin akurat dan lengkap informasi laporan keuangan yang disajikan, maka semakin baik pula kemampuan instansi dalam melakukan monitoring keuangan dan mengendalikan penggunaan kas.

Kemampuan untuk memprediksi penyimpangan anggaran, memperbaiki penggunaan anggaran, dan mencegah kemungkinan salah alokasi dana merupakan manfaat lain dari informasi yang tepat waktu bagi manajemen. Oleh karena itu,

Dinas Sosial Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sangat bergantung pada pelaporan keuangan yang akurat untuk memastikan pengelolaan dana publik yang bertanggung jawab dan efektif.

Berdasarkan kesimpulan penelitian ini, beberapa saran dapat diajukan baik untuk pihak Insansi maupun untuk penelitian selanjutnya:

A. Saran untuk Dinas Sosial Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara

1. Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Utara perlu terus meningkatkan kedisiplinan dalam ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan agar data dapat segera dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi kas secara berkala.
2. Diperlukan optimalisasi sistem pencatatan transaksi keuangan secara digital untuk meminimalkan risiko kesalahan pencatatan manual dan mempercepat proses pelaporan.
3. Evaluasi penggunaan kas perlu dilakukan lebih terstruktur melalui rapat monitoring anggaran bulanan sehingga penyimpangan atau kelebihan beban anggaran dapat diminimalkan sejak dini.
4. Perlu adanya pelatihan dan peningkatan kompetensi pegawai bidang keuangan secara berkala agar pemahaman terhadap regulasi baru dan standar pengelolaan keuangan daerah tetap terbarui.

ISSN : 3025-9495

DAFTAR PUSTAKA

Halim, A. (2020). Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: UPP STIM YKPN: Jurnal Ilmu Riset Akuntansi, 14(5). Dipublikasikan 5 Mei 2025.

Horngren, C. T., Sundem, G. L., & Elliott, W. B. (2020). Pengantar Akuntansi Keuangan. Jakarta: Penerbit Erlangga: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah, 7(2), 187–209. Dipublikasikan 2 Mei 2025.

Sundem, G. L., & Elliott, J. A. (2020). Sistem Informasi Akuntansi Jakarta: Penerbit Salemba Empat Dipublikasikan 1 Januari 2025.

Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D. (2021). Akuntansi Keuangan Menengah. Jakarta: Penerbit Salemba Empat. International Journal of Social Science and Business (IJSSB), 3(4). Dipublikasikan 30 November 2025.

Mahmudi, A. (2020). Akuntansi Keuangan Daerah. Yogyakarta: UPP STIM YKPN: Jurnal Akuntansi Pemerintah Indonesia, 3(1). Dipublikasikan 15 Mei 2025.

Robbins, S. P., & Coulter, M. (2021). Manajemen. Jakarta: Penerbit Erlangga: Jurnal Ekonomi dan Manajemen, 8(1). Dipublikasikan 10 Mei 2025.

Warren, C. S., Reeve, J. M., & Duchac, J. E. (2020). Akuntansi: Pengantar Akuntansi Keuangan. Jakarta: Jurnal Penerbit Salemba Empat (63) Dipublikasikan 18 Mei 2025.

Noh, M. I., Karamoy, H., & Tangkuman, S. J. (2020). Efektivitas informasi dalam prosedur pengelolaan keuangan bendahara penerimaan pada Badan Pengelolaan Kas dan Retribusi Daerah Provinsi Sulawesi Utara Dipublikasikan 10 Mei 2025

Rafael, K., Gamaliel, H., & Korompis, C. W. M. (2020). Efektivitas informasi terkait pengelolaan keuangan daerah berbasis website pada pemerintah kabupaten/kota provinsi Sulawesi Utara Dipublikasikan 10 Mei 2025

Darius, J. G. Kambey, J. P.& Pangkey, R. I. J. (2022). Efektivitas informasi pengelolaan keuangan UMKM di pasar tradisional Bersehati Manado Dipublikasikan 10 Mei 2025.

Kurniawati, A. Syafadan, A. & Hamiid, G. A. (2020). Informasi Pengungkapan dan Penyajian Laporan Keuangan Suatu Tanggung Jawab Etis. Dipublikasikan 10 Mei 2025

Febriyani, D. F. & Wahyuni, M. R. (2020). Efektivitas Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan SAK Pada UMKM Toko Windy Reski. Dipublikasikan 10 Mei 2025

Sari, I. M. & Dewi Hidayatu Mu'arifin, R. S. (2022). Efektivitas Pencatatan Laporan Keuangan Sederhana Berbasis Green Economy Pada UMKM Bontot Ibu Salminah. Dipublikasikan 10 Mei 2025

Kusumaningrum, Y. G. I., & Manafe, W. M. H. A. (2022). Efektivitas Kinerja Bendahara dan Pembantu Bendahara dalam Penausahaan Keuangan Sekretariat DPRD Kota Kupang. Dipublikasikan 10 Mei 2025

Virginia, T., Suwardi, N. & Hermanto, B. (2020). Pengaruh Informasi laporan Kerja Berbasis Value For Money Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota/ Kabupaten Di Jawa Timur 2020-2022. Dipublikasikan 10 Mei 2025

Wawolangi, S. G. V., Morasa, J., & Tirayoh, V. Z. (2021). Efektivitas laporan keuangan untuk menilai kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2021.Dipublikasikan 10 Mei 2025

Kewo, C. L. & Rufaedah, Y. (2020). Pengaruh penerapan tata kelola pemerintahan dan efektivitas audit internal terhadap kualitas laporan keuangan (Studi pada pemerintah kabupaten dan kota di Sulawesi Utara, 2020–2023. Dipublikasikan 10 Mei 2025

Khaulia, A. T., Cahyono, D. & Pramono, D. E. (2020). Pengaruh faktor keprilakuan organisasi terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah. Dipublikasikan 10 Mei 2025

Suoth, N. Tinangon, J. & Rondonuwu, S. (2020). Efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset (DPKPA) Kabupaten Minahasa Selatan. Dipublikasikan 10 Mei 2025

Harared, B. A., & Heriyanto, R. P. (2022). Analisis efektivitas pengendalian internal penerimaan dan pengeluaran kas (Studi kasus pada Klinik X). Dipublikasikan 10 Mei 2025

Cahyaningsih, N., Putra, I. S., & Negara, B. (2022). Efektivitas pengelolaan kas dan setara kas pada PT. Kawasan Industri Medan (Persero) Dipublikasikan 10 Mei 2025

Kalalo, M. Y. B. (2020). Analisis pengelolaan dana desa: Studi kasus di Kecamatan Tatapaan, Kabupaten Minahasa Selatan. Dipublikasikan 10 Mei 2025

Syaifuddin, Y. I., Wulandari, A. S. R., & Susanti, E. (2024). Determinants of the disclosure level of local government financial statements in Central Java Province. International. Dipublikasikan 10 Mei 2025

Supriono, S., Hariyani, E., Silalahi, S. P., Hanif, R. A., & Aswar, K. (2023). Influence factors on financial statements disclosure of Indonesian local governments. Public and Municipal Finance. Dipublikasikan 10 Mei 2025

Widayati, C. Z. V. F., dkk. (2023). The role of accountability in determining the relationship between quality of financial reporting and performance of public organizations. Dipublikasikan 10 Mei 2025

Fauzia, R., Setyaningrum, D., & Martani, D. (2022). The effectiveness of local government financial statement audit by public accounting firm. Dipublikasikan 10 Mei 2025

Bisogno, B. H. L., & Cuadrado-Ballesteros, M. (2023). The impact of public governance perception on the quality of financial reporting. Dipublikasikan 10 Mei 2025.